

**POLITIK PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA**  
**(Studi Tentang Kebijakan Departemen Agama Pada Masa A. Mukti Ali)**

***Fendi Teguh Cahyono***

Perdebatan seputar pendidikan memang tidak pernah pudar, seiring bertambahnya waktu serta mengarah ke masyarakat yang lebih mapan. Sejak sebelum merdeka hingga saat ini persoalan pendidikan masih tetap menarik untuk diperbincangkan. Keseriusan dalam memperbaiki pendidikan menjadi modal awal pemerintah untuk mensejahterakan rakyat, khususnya dari kalangan menengah ke bawah yang itu sebagian besar berada di bagian terluar wilayah Indonesia.

Salah satu keseriusan pemerintah dalam memperbaiki pendidikan adalah dengan menyetarakan antara lembaga pendidikan Islam dengan lembaga pendidikan nasional. Kedua lembaga ini memiliki peran yang sama yaitu sama – sama sebagai wadah anak negeri untuk memperoleh pendidikan layak yang sesuai dengan kebutuhan dari setiap individu peserta didik tersebut.

Tokoh yang berpengaruh dalam memperbaiki pendidikan di Indonesia salah satunya adalah A. Mukti Ali. Dia ketika menjadi menteri agama mampu memberikan kontribusi besar terhadap dunia pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan Islam. Banyak kebijakan tentang pendidikan Islam yang dikeluarkan ketika menjadi menteri agama. Salah satu jasa yang tidak pernah terlupakan hingga saat ini adalah memasukkan mata pelajaran umum ke dalam lembaga pendidikan Islam begitupun sebaliknya.<sup>1</sup> Selain aspek pendidikan A. Mukti Ali ini juga berperan besar terhadap modernisasi lembaga Departemen Agama.<sup>2</sup>

Modernisasi yang dimaksud adalah perubahan paradigma yang digunakan untuk membaca permasalahan kebangsaan. Salah satunya adalah ketika tentang pembentukan lembaga MUI yang pada saat itu masih dianggap tabu. Disisi lain,

<sup>1</sup> Abuddin Nata, *Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 354

<sup>2</sup> Departemen Agama adalah untuk bagian dari aparat pemerintah negara republik Indonesia yang menangani bidang pembangunan dan kehidupan beragama dan dipimpin oleh menteri yang bertanggung jawab kepada presiden. Tugas pokoknya adalah menyelenggarakan sebagian dari tugas pemerintah dan pembangunan dibidang agama

Untuk itu, Penelitian ini menjadi penting dikarenakan terkait dengan kebijakan departemen agama ke arah yang lebih mapan ketika dipimpin oleh A. Mukti Ali. Dengan pembahasan Bagaimana Kebijakan Departemen Agama pada masa Menteri Agama A. Mukti Ali di bidang pendidikan Islam? Dan bagaimana Implikasi Kebijakan Departemen Agama pada masa Menteri Agama A. Mukti Ali terhadap Pendidikan Islam di Indonesia pada masa orde baru?

Pendidikan merupakan suatu proses generasi muda untuk dapat menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efektif dan efisien. Pendidikan lebih dari pada pengajaran, karena pengajaran sebagai suatu proses transfer ilmu belaka, sedang pendidikan merupakan transformasi nilai dan pembentukan kepribadian dengan segala aspek yang dicakupnya

Dengan demikian, penguasa berperan penuh untuk membuat kebijakan demi mencapai tujuan yang diinginkan yaitu kesejahteraan dan keadilan. Peran andil pemerintah untuk mengembangkan pendidikan ini dapat dikategorikan sebagai politik<sup>4</sup> pendidikan karena ada tujuan kolektif dalam pengembangan pendidikan tersebut.

<sup>3</sup> Muhsin, *Politik Hukum Dalam Pendidikan Nasional*, (Surabaya: PT. Bina ilmu offset, 2007), 22

2



Setelah menamatkan studinya di UII Yogyakarta, A. Mukti Ali kemudian melanjutkan pendidikannya di luar negeri, yang diawali di Mekah yang hanya beberapa bulan kemudian melanjutkan di program sarjana muda di fakultas sastra Arab, universitas Karachi dan tamat dengan memperoleh gelar Ph. D. Kemudian dilanjutkan Studi di Institute of Islamic studies, McGill University, Montreal, Kanada.

<sup>7</sup> Wilfred Cantwell Smith adalah seorang pendeta pendiri Islamic Studies di McGill University yang memiliki reputasi internasional dalam diskursus studi agama-agama. Menurut Smith, pokok dan inti permasalahan dunia selama ini terletak pada terminologi “agama” itu sendiri. Pemahaman terhadap agama inilah yang memecah-belah umat manusia menjadi sekte-sekte dan kelompok-kelompok agama yang bermacam-macam dan berbeda-beda, bahkan saling bertentangan dan berseberangan. Setiap penganut agama-agama tersebut menganggap diri mereka sebagai kebenaran tunggal. Oleh karena itu, Smith mengusulkan untuk membuang kata “agama” tersebut, menurutnya di dunia tidak ada agama. Apa yang dianggap agama selama ini tidak lain dari sekedar nama sekumpulan keyakinan-keyakinan yang terorganisir yang terus menerus berkembang dari masa ke masa yang sebenarnya tidak memiliki esensi sama sekali yang bisa dipahami dengan jelas tanpa perdebatan. Smith dalam hal ini memahami agama hanya dalam realias empiris, sesuai dengan pendekatan yang dia gunakan yaitu empiris kemanusiaan.

4

## IV

Terdapat empat poin penting terkait pemikiran dan kebijakan A. Mukti Ali, khususnya tentang pengembangan pendidikan Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai kebijakannya sebagai berikut.<sup>9</sup>

1. Kebijakan tentang pembenahan lembaga pendidikan Islam. Upaya ini antara lain dilakukan dengan mengambil inisiatif dengan merembuk berbagai rencana itu dengan departemen lain, khususnya departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Setelah melalui proses panjang dan hati - hati, lahirlah surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri P&K dan Menteri Dalam Negeri, atau yang dikenal SKB tiga menteri, No.6 Tahun 1975, dan No. 037/U/a975.<sup>10</sup> Dalam SKB tiga menteri tersebut ditegaskan: (1) agar ijazah madrasah dalam semua jenjang dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum; (2) agar lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat dan lebih di atas; (3) agar siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat, maka kurikulum yang diselenggarakan madrasah harus terdiri dari 70% pelajaran umum, dan 30% pelajaran agama.

Melalui kebijakan SKB<sup>11</sup> ini paling kurang ada dua hal penting bagi masa depan pendidikan Islam di Indonesia. *Pertama*, dalam rangka integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. *Kedua*, dengan memasukkan kurikulum pelajaran umum dalam jumlah jam yang besar, diharapkan pembenahan madrasah untuk di transformasikan menjadi lembaga pendidikan yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia Muslim akan dapat diwujudkan. Dengan cara demikian, pengakuan

<sup>9</sup> Abuddin Nata, *Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat*, ..... , 354.

<sup>10</sup> Ali Munhanif, *prof. Dr. A. Mukti Ali*....., 313.

<sup>11</sup> Dalam SKB Tiga Menteri ini. Terdapat pro dan kontra dikalangan masyarakat. Termasuk para ulama', ustad dan pengelola pendidikan Islam yang memang orang yang langsung berurusan dengan nasib madrasah. Mereka menolak dengan menganggap dapat mematikan pendidikan islam dikarenakan porsi kurikulum mata pelajaran umum itu terlalu besar. Sehingga dikawatirkan akan menghilangkan misi lembaga pendidikan Islam sebagai tempat untuk menuntut ilmu agama.

masyarakat terhadap keberadaan lembaga pendidikan Islam di masa mendatang semakin kuat.

2. Kebijakan tentang modernisasi lembaga pesantren. Meskipun A. Mukti Ali menjaga kemandirian pesantren dengan mempertahankan sistem atau bahkan kurikulum yang sudah berjalan, keinginannya untuk membawa pesantren ke pusat perhatian Orde Baru sangat besar.

Melalui SKB Menteri Agama dengan Menteri Pertanian No. 34 A Tahun 1972, mengadakan program bersama dengan Departemen Pertanian untuk mengadakan pembinaan pondok pesantren dalam bidang pertanian dan perikanan. Kerja sama itu juga dilakukan dengan departemen - departemen lain, yang intinya ditujukan untuk memberi pembinaan - pembinaan manajerial bagi pengelolaan lembaga pendidikan Islam.

3. Kebijakan tentang pembenahan IAIN. Segera setelah Departemen Agama mencanangkan perluasan pendidikan tinggi bagi umat Islam, sebagaimana tercantum dalam Repelita I Tahun 1969 - 1973,<sup>12</sup> umat Islam secara beramai-ramai entah atas nama yayasan agama, organisasi, pesantren atau pribadi, mendirikan IAIN<sup>13</sup>.

Menurut laporan Departemen Agama, disebutkan bahwa pada pertengahan tahun 1973, jumlah lembaga pendidikan tinggi Islam se Indonesia ada sekitar 112 IAIN, tersebar di seluruh pelosok tanah air. Ada yang di kota besar, dan ada juga yang di kota kecamatan, bahkan di pedesaan.

Mempertimbangkan perkembangan ini, A. Mukti Ali kemudian meneliti kelayakan IAIN yang berjumlah besar itu. Hasilnya berdasarkan Keputusan Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama (Bimperta) No. 32 Tahun 1975, dari 112 IAIN itu hanya 13, semuanya terdapat di kota provinsi,

<sup>12</sup> Repelita 1 merupakan jargon kebijakan pada masa kabinet pembangunan 1, orde baru. Tujuan diselenggarakannya repelita 1 adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar – dasar bagi pembangunan dalam tahap pemerintah berikutnya. Sasaran dari repelita 1 ini adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.

<sup>13</sup> Terhadap IAIN, A. Mukti Ali menanam kesadaran bersama bahwa IAIN memiliki tugas yang sama dengan perguruan tinggi lainnya. Artinya, IAIN harus melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi usaha pengajaran dan pendidikan, penelitian serta pengabdian masyarakat.



pengembangan IAIN selanjutnya.<sup>14</sup>

- Departemen Agama yang dikirim ke Barat ada sekitar 55 orang.<sup>15</sup>

Eropa dan Asia.<sup>16</sup>

## V

ijazah madrasah dalam semua jenjang dapat mempunyai nilai yang sama

<sup>14</sup> Ali Munhanif, *Prof. Dr. A. Mukti Ali; .....*, 317.

<sup>15</sup> Abuddin Nata, *Pemikiran Pendidikan*....., 354.

<sup>16</sup> Fuad Jabali dkk, *IAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2002), 19.

Kebijakan Departemen Agama pada masa A. Mukti Ali menjadi Menteri Agama ini berdampak besar pada pendidikan di Indonesia. Hal ini dikarenakan mata pelajaran umum hampir 70 % dimasukkan ke dalam kurikulum pengajaran lembaga pendidikan Islam. Secara keseluruhan, kebijakan menteri agama ini berdampak tidak hanya pada ranah pendidikan. Hemat penulis, kebijakan ini berdampak pada system kehidupan disegala bidang. Masyarakat Indonesia mulai masuk pada masa babak baru yang ditandai dengan modernisasi lembaga pemerintahan. Dalam ranah yang lebih konkrit adalah lembaga pemerintahan tidak hanya dikuasai oleh kelompok keagamaan tertentu.